

PERAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS (UPT) DALAM  
PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL WANITA TUNA SUSLA  
(WTS) DI JAWA TIMUR  
( Studi di UPT Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kota Kediri )

SKRIPSI



Oleh:

INDRA ARIF SETYAWAN

NPM. 0941010054

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

SURABAYA

2013

## LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN UPT DALAM PELAKSANAAN TEKNIS REHABILITASI SOSIAL WANITA  
TUNA SUSLA (WTS) DI JAWA TIMUR  
( Studi di UPT Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kota Kediri )**

**Disusun Oleh :**

**INDRA ARIF SETYAWAN**  
NPM . 0941010054

**Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Skripsi**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**



**Dr. Lukman Arif, MSi.**  
NIP.196411021994031001

**Mengetahui,**



**DEKAN**  
**Dra. Hj. Suparwati, M.Si**  
NIP. 195507181983022001

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) REHABILITASI SOSIAL WANITA TUNA  
SUSILA (WTS) DI JAWA TIMUR  
(Studi di UPT Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kota Kediri)**

**OLEH**

**INDRA ARIF SETYAWAN**  
NPM. 0941010054

**Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada Tanggal. 24 Mei 2013**

**MENYETUJUI,**

**PEMBIMBING:**



**Dr. Lukman Arif, MSi**  
NIP : 196411021994031101

**TIM PENGUJI**

1. 

**Dr. Lukman Arif, MSi**  
NIP : 196411021994031101

2.



**Dr. Ertien R. Nawangsari, MSi**  
NIP.: 196801161994032001

3



**Dra. Susi Hardjati, MAP**  
NIP : 196902101993032001



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji syukur Alhamdulillah pada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini (SKRIPSI) yang berjudul “PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL WANITA TUNA SUSLA (WTS) DI JAWA TIMUR ( Studi di UPT Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri ).

Pembuatan SKRIPSI ini merupakan bagian dari proses pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang wajib diselesaikan oleh setiap mahasiswa yang merupakan persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S1) Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di UPN “Veteran” Jawa Timur.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Bpk Dr. Lukman Arif M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

Disamping itu penulis juga telah mendapatkan banyak bantuan pikiran atau tenaga dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dra. Hj. Suparwati, Msi, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jawa Timur.
2. Bpk Dr. Lukman Arif MSi, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UPN “VETERAN” Jawa Timur
3. Ibu Dra. Susi Hardjati, MAP selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UPN”Veteran”Jatim
4. Bpk. Yusuf selaku Kabid. Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Prov-Jawa timur
5. Kepala UPT Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri
6. Dra. Retno Murti A. Selaku Kasi Rehabilitasi dan Binjut UPT Resos Tuna Susila Kediri
7. Orang Tua dan teman-teman yang telah membantu dan memberikan masukan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, April 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR REVISI	
ABSTRAKSI .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LatarBelakang .....	1
1.2 RumusanMasalah .....	12
1.3 TujuanPenelitian .....	12
1.4 ManfaatPenelitian .....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 PenelitianTerdahulu .....	14
2.2 LandasanTeori .....	16
2.2.1 PermasalahanSosial .....	16
2.2.2 PerubahanSosial .....	17
2.2.3 KebijakanPublik .....	19
2.2.4 Implementasi Kebijakan .....	22
2.2.4.1 Model Implementasi Kebijakan .....	23
2.2.4.2 Faktor Keberhasilan Implemetasi Kebijakan .....	24
2.2.4.3 Aktor yang Berperan Proses Kebijakan .....	25
2.2.5 Peranan .....	27

2.2.5.1 Pengertian Peranan .....	27
2.2.6.1 Macam-Macam Peranan .....	28
2.2.6 Pengertian Rehabilitasi .....	29
2.2.7 Pengertian Pembinaan .....	33
2.2.8 Pengertian Bimbingan Keterampilan .....	35
2.2.9 Pengertian Pemberdayaan .....	39
2.3 Kerangka Berfikir .....	41

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian .....	44
3.2 Fokus Penelitian .....	45
3.3 Lokasi Penelitian .....	49
3.4 Sumber Data .....	50
3.5 Jenis Data .....	51
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	52
3.7 Analisis Data Ejaq .....	52
3.8 Keabsahan Data .....	54

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	57
A. Sejarah Berdirinya UPT Resos Tuna Susila.....	57
B. Letak Geografis .....	59
C. Landasan Hukum .....	60
D. Struktur Organisasi .....	61
E. Tugas Pokok dan Fungsi .....	63
F. Maksud dan Tujuan Berdirinya UPT .....	69
4.2 Hasil Penelitian .....	71
4.2.1 Peran UPT dalam Pelaksanaan Bimbingan Mental .....	71
4.2.1.1 Persiapan Bimbingan Mental .....	73

4.2.1.2 Pelaksanaan Bimbingan Mental .....	76
4.2.2 Peran UPT dalam Pelaksanaan Bimbingan Sosial .....	81
4.2.2.1 Persiapan Bimbingan Sosial .....	82
4.2.2.2 Pelaksanaan Bimbingan Sosial .....	84
4.2.3 Peran UPT dalam Pelaksanaan Bimbingan Fisik .....	88
4.2.3.1 Persiapan Bimbingan Fisik .....	88
4.2.3.2 Pelaksanaan Bimbingan Fisik .....	90
4.2.4 Peran UPT dalam Pelaksanaan Bimbingan dan Keterampilan .....	94
4.2.4.1 Persiapan Bimbingan Keterampilan .....	94
4.2.4.2 Pelaksanaan Bimbingan Keterampilan .....	97
4.3 Pembahasan .....	107
4.3.1 Peran UPT dalam Pelaksanaan Bimbingan Mental .....	107
4.3.2 Peran UPT dalam Pelaksanaan Bimbingan Sosial .....	109
4.3.3 Peran UPT dalam Pelaksanaan Bimbingan Fisik .....	112
4.3.4 Peran UPT dalam Pelaksanaan Bimbingan Keterampilan .....	113
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	117
5.1.1 Peran UPT dalam Pelaksanaan Bimbingan Mental .....	117
5.1.2 Peran UPT dalam Pelaksanaan Bimbingan Sosial .....	117
5.1.3 Peran UPT dalam Pelaksanaan Bimbingan Fisik .....	118
5.1.4 Peran UPT dalam Pelaksanaan Bimbingan Keterampilan .....	118
5.2 Saran .....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## ABSTRAKSI

INDRA ARIF SETYAWAN, 2013, Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila (WTS) di Jawa Timur (Studi di UPT Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri). Dosen Pembimbing : Dr. Lukman Arif, Msi

Penelitian ini didasarkan banyaknya permasalahan sosial atau penyakit sosial yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat di antaranya adalah adanya wts yang dapat menyebarkan penyakit HIV AID dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran UPT tersebut dalam pelaksanaan rehabilitasi wts melalui bimbingan-bimbingan yang ada.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi serta dokumentasi. Sample atau informan dalam penelitian ini adalah : Kasi Rehabilitasi dan Binjut di UPT, Staf rehabilitasi, Staf Pelayanan, Aktor/Instruktur Keterampilan dan Klien/wts. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Data Model interaktif (Miles dan Huberman). Keabsahan data dalam penelitian meliputi: derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yang pertama pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran UPT dalam pelaksanaan Rehabilitasi wts di Kediri Jawa Timur sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peran UPT semestinya. Jadi UPT telah berperan penting dalam rehabilitasi wts. Hal tersebut dapat dilihat tersebut dapat dilihat pada pelaksanaan setiap bimbingan dan keterampilan yang ada yaitu pada tahap persiapan UPT menyiapkan fasilitas hingga melakukan kerja sama dengan instansi/lembaga lain, jadi adanya persiapan tersebut maka pelaksanaan dapat berjalan, hal tersebut dilihat seperti bentuk pelaksanaan bimbingan yang diberikan pada klien sampai dengan siapa aktor/instruktur bimbingan dan keterampilan yang merupakan hasil kerja sama UPT. Semua kegiatan tersebut telah dilakukan sesuai dengan tugas atau peran UPT yang tertulis pada perub No.199 Tahun 2008 mengenai Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

(Keyword : Kebijakan Publik, Peran UPT dalam Pelaksanaan Rehabilitasi)

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kehidupan masyarakat Indonesia merupakan kehidupan yang sangat kompleks dengan adanya berbagai masalah sosial yang melanda beberapa masyarakat yang ada di Indonesia. Adanya berbagai permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat itu sendiri membuat mereka hidup yang tidak normal atau tidak semestinya seperti rendahnya ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Permasalahan sosial merupakan salah satu wujud dari dampak negatif ilmu sosial. (Soekanto 2001:30) Permasalahan sosial adalah beberapa kondisi yang terlahir dari sebuah keadaan masyarakat yang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya yang sehingga mengakibatkan kekecewaan dan penderitaan. Permasalahan sosial itu muncul karena juga dipengaruhi oleh tidak meratanya kesejahteraan sosial, dimana seseorang atau masyarakat yang tidak mendapatkan kehidupan sosial yang layak.

Seseorang yang mengalami kesejahteraan sosial bisa disebut sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (Jasmani, Rohani, dan Sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, dan perubahan lingkungan secara mendadak. Dalam hal ini yang

sering mengalami permasalahan sosial biasanya kaum perempuan, Salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yaitu Wanita Tuna Susila (WTS).

Wts merupakan masalah sosial, karena perbuatannya tersebut menyimpang dari norma-norma atau nilai-nilai masyarakat serta tidak mempunyai sopan santun. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut wts ini seperti pelacur, balon, sundel dan kupu-kupu malam (Koentjoro, 2004:27). Artinya bahwa yang dilakukan oleh wts adalah melakukan hubungan-hubungan seksual dengan laki-laki diluar perkawinan dan berganti-ganti pasangan, serta untuk melakukannya menerima imbalan uang atau bentuk material yang lain. wts atau wanita pelacur adalah wanita yang menjual tubuhnya untuk memuaskan seksual laki – laki siapapun yang menginginkannya, dimana wanita tersebut menerima sejumlah uang atau barang (umumnya dengan uang dari laki-laki pemakaiannya) (Soedjono D, 1977:16). Pelacur adalah pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah (Soekanto, 2001:417).

Aktivitas penjaan seks atau pelacuran ini dipandang masyarakat sebagai sisi hitam dari kehidupan sosial yang megah. Adanya sikap ironis masyarakat dan pemerintah terhadap pelacuran berada pada kondisi untuk dikutuk sekaligus dilestarikan. Dikutuk karena memang bertentangan dengan nilai-nilai moral kelompok dominan yang pada umumnya menggunakan standart ganda (perempuan pelacur dikutuk, laki-laki yang melacur didiamkan). Dilestarikan karena memang memiliki basis material yang terkait erat pada pengorganisasian

produksi. Warna pandangan ini menyebabkan kita melihat keremang-remangan dalam kehidupan pelacuran, (Katjasungkana 1995:31).

Adanya wts ditengah masyarakat maka dianggap sebagai permasalahan sosial dan sangat mengganggu masyarakat disekitarnya atau sebagai sumber penyakit sosial dimasyarakat. Ini karena perbuatan tersebut dilarang oleh agama maupun norma-norma masyarakat yang mana perbuatan tersebut adalah dosa besar. (Soedjono D, 1982: 126) juga mengemukakan bahwa akibat negatif dari adanya praktek wts ini adalah :

1. Dapat menimbulkan dan menyebarkan penyakit kulit, kelamin dan sejenisnya
2. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga yang wajar
3. Merusak sendi-sendi pendidikan moral, bertentangan dengan norma-norma agama, norma sosial, dan norma hukum

Seperti yang tertulis diatas yang salah satu akibat negatif adanya praktek wts adalah terjadinya atau penularan virus HIV dan seperti yang dikemukakan diatas juga marak diberitakan dimana-mana, seperti yang dikatakan “Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Esty Martiana Rachmie mengatakan, hubungan seks bebas kini menduduki peringkat pertama penyebab penularan virus HIV AIDS. Sebanyak 89% penularan HIV-AIDS di Surabaya tahun ini terjadi akibat hubungan seks”.(kompas.com.09,11.2012).

Yang ditambah adanya data dari Dinas Kesehatan Jawa Timur yang menyebutkan jumlah pengidap HIV tahun 2012 di Jawa Timur sebanyak 14.034 (9.2%) dari seluruh penduduk Jawa Timur yang jumlahnya mencapai 41.437.769 jiwa pada tahun 2012, jumlah tersebut mengalahkan jumlah pengidap HIV yang

ada di lokalisasi yang tersebar di Jawa Timur yaitu sebanyak (7,6%). Dengan jumlah pengidap HIV AIDS tersebut Jawa Timur menduduki peringkat ke-2 setelah DKI yang diikuti Papua, Jawa Barat dan Bali. Distribusi atau penyebaran virus HIV telah berada di berbagai kota yang ada di Jawa Timur, hal ini dapat dilihat pada gambar yang ada dibawah:

Daftar Gambar 1.1  
Distribusi kasus HIV Juni 2012 Provinsi Jawa Timur



Sumber: Dinas Kesehatan Jawa Timur (Juni, 2012)

Pada gambar diatas jelas penyebaran HIV yang paling besar yaitu di Kota Surabaya yang bertanda merah diatas, hal ini sudah tidak asing lagi bahwa Kota Surabaya adalah kota terbesar setelah DKI Jakarta dan Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Lokalisasi. Dijelaskan pada halaman sebelumnya bahwa Surabaya sebagai Kota terbesar sebagai penyebar HIV AIDS yaitu 89%.

Tentunya hal tersebut membuat para masyarakat semakin takut dan geram akan adanya penyakit seperti HIV AIDS yang menyebar di berbagai tempat, masyarakat sangat mengharapkan peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan sosial khususnya wts yang dapat menyebabkan menyebar luasnya beberapa penyakit.

Bersamaan dengan permasalahan atau fenomena tersebut perlu adanya kebijakan serta penanganan mengenai rehabilitasi sosial untuk para wts. Kebijakan atau penanganan tersebut mengenai usaha penyembuhan dan pemulihan para wts melalui pembinaan/ bimbingan agar mereka dapat hidup secara wajar dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan hidup sehat tentunya.

Dalam hal ini diharapkan kerjasama semua pihak, seperti Pemerintah Pusat/ Daerah maupun peran Masyarakat untuk ikut dalam mengentaskan permasalahan sosial yang salah satunya adalah wts. Maka dalam mengatasi Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya wts. Kementerian Sosial mempunyai tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat dengan yaitu mengedepankan penanganan sosial khususnya dibidang rehabilitasi sosial wts dan pemberdayaan sosial bagi para wts. Pemerintah dan pemerintah daerah setempat juga mempunyai tanggung jawab dalam mengatasi hal tersebut, sesuai kebijakan yang tercantum dalam:

- a. Keputusan Menteri Sosial RI No. 20/HUK/1999, tentang Rehabilitasi Sosial penyandang masalah Tuna Susila.
- b. Keputusan Menteri Sosial No. 06/HUK/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dpertemen Sosial.
- c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan sosial

Dalam hal ini pelaksanaan penanganan masalah wts pada tingkat Provinsi adalah tugas dari pemerintah Provinsi beserta daerah setempat yang secara fungsional baik bersifat Kuantitas atau Kualitas rehabilitasi wts. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur merupakan pemerintah provinsi yang menangani

permasalahan sosial yang salah satunya adalah para wts yaitu dengan cara Rehabilitasi Sosial. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah menyediakan tempat khusus bagi para wts untuk direhabilitasi. Tempat untuk melakukan rehabilitasi wts di Jawa Timur tersebut adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial Tuna Susila di Kediri. Bagaimana tugas pelaksanaan rehabilitasi tersebut tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor. 199 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

UPT Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri adalah tempat dimana para Tuna Susila atau perempuan-perempuan yang mempunyai permasalahan sosial termasuk wts untuk melayani atau memberi bimbingan agar wts menjadi masyarakat yang mandiri, berdaya serta dapat menjalankan fungsi sosialnya seperti masyarakat pada umumnya. UPT Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri memiliki tanggung jawab dan tugas dalam melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial Tuna Susila atau wts.

Maka dengan kewenangan yang diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, maka UPT Resos Tuna Susila Kediri mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan Bahan penyusunan pedoman pelayanan dan rehabilitasi Sosial, serta pembinaan lanjut bagi Tuna Susila.
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi Sosial, serta pembinaan lanjut bagi bekas Tuna Susila,
- c. Memberikan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi Sosial, serta pembinaan lanjut bagi Tuna Susila.

- d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta pembinaan lanjut bagi bekas Tuna Susila.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Rehabilitasi dilakukan untuk wts agar mereka dapat memiliki rasa percaya diri, kemauan, kemampuan dalm menghadapi kehidupan dan penghidupan. Seperti Visi dari UPT Resos Tuna Susila Provinsi Jawa Timur, yaitu terwujudnya tata kehidupan yang normatif bagi penyandang masalah dengan diliputi rasa kesusilaan.

Kegiatan rehabilitasi ini juga bertujuan untuk mengurangi jumlah WTS yang ada di Lokalisasi atau wts Jalanan di Seluruh Jawa Timur dan mengembalikan perilaku yang menyimpang mereka agar dapat diterima dimasyarakat kembali dan tanpa adanya diskriminasi.

Rehabilitasi sosial di UPT ini meliputi:

1. Bimbingan Mental
2. Bimbingan Sosial
3. Bimbingan Fisik
4. Bimbingan Keterampilan

Dalam rehabilitasi ini UPT melakukan perannya sesuai dengan pergub no. 199 tahun 2008 tersebut. Peran UPT disini adalah melakukan persiapan sebelum kegiatan bimbingan-bimbingan dilakukan, persiapan tersebut meliputi penyiapan tempat bimbingan, mempersiapkan kerja sama dengan instruktur masing-masing bimbingan dan menyiapkan peralatan atau fasilitas yang



mungkin akan digunakan dalam pelaksanaan bimbingan. Persiapan tersebut dilakukan agar setiap pelaksanaan bimbingan yang ada dapat berjalan dengan baik dan optimal dan jika semua bimbingan berjalan dengan baik maka peran UPT secara keseluruhan akan optimal dan sesuai dengan kebijakan yang ada. Dalam pelaksanaan bimbingan yang ada UPT juga melakukan sebuah pengawasan untuk mengetahui bagaimana proses pemberian pelatihan atau pembinaan pada wts berjalan dengan baik atau tidak dan telah sesuai program yang dibuat UPT atau tidak.

Pelaksanaan rehabilitasi wts di UPT tidak begitu saja dilakukan pada wts, tetapi wts yang akan direhabilitasi tersebut harus sesuai dengan persyaratan yang telah ada.

Dalam program rehabilitasi ini, UPT memiliki syarat kusus untuk calon klien/wts yang akan direhabilitasi, dimana persyaratan tersebut yaitu:

1. Berusia 18-45 tahun
2. Sehat jasmani dan rohani
3. Wajib tinggal di asrama dan mematuhi peraturan yang ada
4. Wajib mengikuti program bimbinga-bimbingan yang ada.

Jadi selama wts di UPT, mereka wajib mengikuti program atau kegiatan bimbingan selama dalam masa Rehabilitasi. Para wts akan mendapatkan pelayanan di dalam UPT termasuk adanya kegiatan pelatihan/ pembekalan. Lama pelatihan dan pembekalan kompetensi atau bimbingan tersebut adalah selama 4 bulan, artinya para wts akan ditempatkan dalam satu asrama atau panti dengan jumlah untuk satu angkatan adalah 60 klien yang didalamnya terdapat wts dan

juga tuna susila lainnya seperti korban narkoba, korban kekerasan dan lainnya tetapi peneliti disini hanya mengambil obyek atau meneliti wts untuk direhabilitasi melalui bimbingan dan keterampilan.

Selama empat bulan tersebut wts dibina atau dibimbing serta diberikan bekal keterampilan agar wts tersebut bisa menjadi masyarakat lebih baik lagi, terlebih bisa mandiri, berdaya dan tidak menjadi wts kembali. Tetapi UPT rehabilitasi sosial tuna susila ini hanya sebagai pelaksana rehabilitasi pada tuna susila serta wts, yang artinya bahwa para tuna susila atau yang dimaksud adalah wts yang berasal dari hasil razia yang dilakukan oleh dinas sosial kota/ kabupaten di Jawa Timur serta beberapa para wts yang datang dengan sendirinya untuk mengikuti rehabilitasi. Sehingga peranan UPT disini hanya pada pelaksanaan rehabilitasi yang ada, baik kegiatan persiapannya hingga dalam pelaksanaan pemberian bimbingan pada wts

Selain kegiatan persiapan hingga pada pelaksanaan UPT Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Provinsi Jawa Timur juga selalu melakukan pendataan wts sebelum direhabilitasi, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui Jumlah wts yang ada serta mengetahui darimana asal wts yang akan mengikuti rehabilitasi. Seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah mengenai data jumlah wts angkatan 1 bulan Februari 2013.

Tabel 1.1  
Daftar jumlah wts di UPT Resos Tuna Susila Kediri tahun 2013 dari beberapa kota/kab di Jawa Timur

No	Nama	Umur	Alamat
1	Sulastri	23	Nganjuk
2	Binarti	27	Nganjuk
3	Nanik	29	Ponorogo
4	Surati	27	Pacitan
5	Sutini	29	Ponorogo
6	Eva	25	Sumenep
7	Indah	28	Nganjuk
8	Sudarti	23	Nganjuk
9	Rina	32	Nganjuk
10	Murtini	23	Tuban
11	Dwi	25	Bojonegoro
12	Hartini	32	Tuban
13	Sri	26	Bojonegoro
14	Asih	40	Kediri
15	Asriani	27	Situbondo
16	Fitri	35	Denpasar
17	Yayuk	27	Jember
18	Kasri	43	Jember
19	Ponik	35	Lumajang
20	Aisyah	30	Lombok barat
21	Sumiati	41	Jember
22	Lilik	27	Bangil
23	Mariatun	45	Jember
24	Muslimah	29	Surabaya
25	Krismi	23	Malang
26	Supina	34	Banyuwangi
27	Nurul	35	Probolinggo
28	Mariati	29	Kediri
29	Ida	28	Kediri
30	Siti	26	Nganjuk
31	Susanti	22	Kediri
32	Nila	21	Kediri
33	Surati	28	Lamongan
34	Wiwin	30	Tuban

Sumber: UPT Resos Tuna Susila Kediri, Februari, 2013

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa jumlah wts yang mengikuti rehabilitasi di UPT Resos Tuna Susila Kediri pada angkatan pertama tahun 2013

dapat terbilang banyak, karena untuk satu angkatan yang lamanya rehabilitasi selama 4 bulan saja jumlahnya hampir 40 wts, apa lagi jika dihitung secara keseluruhan dalam satu tahun maka kemungkinan akan lebih banyak lagi. Jadi diharapkan peran UPT untuk menangani permasalahan sosial seperti wts yang dapat membuat masyarakat merasa terganggu. Dalam tabel diatas juga dapat dilihat bahwa umur mereka rata-rata dibawah 35 tahun. Dari sisi umur tersebut memang mereka masih tergolong muda, sehingga mungkin dengan alasan tersebut mereka masih tetap menjajakan diri sebagai wts, tetapi tidak menutup kemungkinan juga karena masalah ekonomi/ pendidikan yang rendah dan lain sebagainya. Namun, seiring berjalannya kegiatan rehabilitasi wts yang salah satunya dilakukan oleh UPT tersebut, maka jumlah wts di Jawa Timur mulai berkurang. Hal tersebut terlihat dengan adanya data dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan jumlah WTS di Jawa Timur dari tahun ke tahun jumlahnya semakin menurun, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 1.2

Data jumlah wanita tuna susila (wts) diseluruh Jawa Timur dari tahun 2011-2012

Tahun	Jumlah
2011	27. 494 WTS
2012	24. 066 WTS

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah wts dari tahun 2011-2012 jumlahnya semakin menurun, hal ini dikarenakan berjalannya dari kegiatan atau peran dari UPT Resos Tuna Susila Kediri dalam merehabilitasi wts di Jawa Timur. Dalam mengurangi jumlah para wts di Jawa Timur, UPT Rehabilitasi

Sosial Tuna Susila Provinsi Jawa Timur yang ada di Kediri melakukan rehabilitasi melalui bimbingan-bimbingan dan keterampilan yang ada. Pada bimbingan dan keterampilan tersebut wts dibina untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi baik secara mental ataupun kemampuan lainnya.

(Mifta Thoha, 2002:7) mengemukakan pengertian pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atas berbagai kemungkinan, perkembangan atau atas peningkatan sesuatu. Bimbingan keterampilan kerja diarahkan agar seseorang mampu mandiri secara ekonomi. Oleh karena itu, bimbingan keterampilan kerja memuat materi bimbingan kewirausahaan (Dep. Sos. RI, 1997; S:3).

Kegiatan pembinaan atau bimbingan dan ketrampilan ini mempunyai tujuan khusus yaitu memulihkan kembali harga diri, sikap perilaku dan peran sosial dalam masyarakat sehingga para wts tidak akan bekerja menjadi wts lagi.

Setelah memaparkan latar belakang dan fenomena yang terjadi di lapangan, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL WANITA TUNA SUSLA (WTS) DI JAWA TIMUR ”(Studi di UPT Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri)

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas maka peneliti akan berusaha memfokuskan dan membatasi penelitian ini dengan permasalahan yang ingin diketahui yaitu “Bagaimana peran UPT dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial

Wanita Tuna Susila (WTS) melalui Bimbingan dan Keterampilan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Resos Tuna Susila di Kediri”

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Resos Tuna Susila Kediri dalam Pelaksanaan Rehabilitasi wanita tuna susila (wts) di Jawa Timur.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan tentang bagaimana Peran UPT Resos Tuna Susila Kediri dalam melakukan Rehabilitasi dan terlebih untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari setiap bimbingan yang ada di UPT.

#### 2. Bagi Universitas

Menambah rasa kerja sama antara Universitas dengan Instansi dalam kegiatan ilmiah, menambah arsip perpustakaan guna kepentingan dalam penelitian.

#### 3. Bagi Instansi

Semoga dapat menjadi masukan-masukan yang positif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam Instansi terkait.